

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan menjadi permasalahan sosial yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Hal ini didasarkan pada banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat peningkatan pengaduan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 4.371 kasus dari 4.322 kasus. Angka ini menunjukkan rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus setiap harinya. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari tahun 2020 dimana rata-rata pengaduan per hari sebanyak sembilan kasus. Data pengaduan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus), kemudian diikuti dengan kekerasan psikis (2.083 kasus). Sedangkan data dari lembaga layanan tercatat 4.102 pengaduan kasus kekerasan seksual (Komnasperempuan.go.id, 2023).

Hasil survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menemukan bahwa 1 dari 4 perempuan berusia 15 hingga 64 tahun selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual (Kemenpppa.go.id, 2021, Desember 28). Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau

gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual dapat dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik dan melalui teknologi informasi dan komunikasi (Kemdikbud.go.id).

Korban kekerasan seksual seringkali mendapat label negatif atau stigma dari masyarakat sekitar. Terjadinya kekerasan seksual justru dianggap sebagai kesalahan korban (Tarida, 2023, September 7). Penelitian yang berjudul “Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat terhadap Korban Kekerasan Seksual” menemukan bahwa para korban justru mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, teman, tetangga, bahkan media sosial. Para korban justru disalahkan karena penampilan, cara berbicara, dirundung di media sosial, hingga diminta untuk bertobat (Masudah, 2022, h. 6). Keplinger (dalam Prihandini, 2021, h.2) mengungkapkan korban kekerasan seksual memilih untuk diam karena dianggap menyebarkan aib, bahkan ketika ada yang berani mengungkapkan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah karena mereka sendiri yang telah memancing perbuatan tersebut.

Kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibandingkan kekerasan terhadap perempuan lainnya karena kerap kali dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Ketika perempuan mengalami kekerasan seksual justru kerap dipandang menjadi aib dan menyalahkan korban (Komnasperempuan.go.id). Adanya stigma dan sanksi sosial yang dialami oleh korban kekerasan seksual mengakibatkan korban seringkali bungkam. Informasi

bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual menjadi informasi yang sulit diungkapkan atau dibagikan kepada orang lain sehingga menjadi informasi yang bersifat privasi.

Kekerasan seksual dapat berdampak pada tiga aspek, yakni psikologis, fisik, dan sosial korban (Elmira, 2021, Juni 29). Kekerasan seksual memiliki dampak negatif pada kesehatan mental korban, gejala depresi, dan gejala PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*) (Catabay dkk., 2019). Para korban kekerasan seksual kerap mengalami trauma berkepanjangan. Dampak traumatis yang dialami korban dapat melanda sepanjang riwayat hidup (Tambunan, 2023, Juni 20). Trauma setelah mengalami kekerasan seksual beragam, ada yang menutup diri dari kehidupan, diam, dan tidak mau bertemu dengan orang lain (Dulwahab dkk., 2020, h. 78). Penelitian yang berjudul “*Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis” menemukan bahwa korban merasa ketakutan dan trauma dalam waktu yang cukup lama setelah kejadian tersebut. Para korban juga cenderung untuk memilih diam dan tidak melawan saat kejadian tersebut (Qila dkk., 2021. h.104).

Korban kekerasan seksual harus dipulihkan secara mental, didukung oleh lingkungan, bahkan bantuan dari profesional (Dulwahab dkk., 2020, h. 75). Untuk mendapatkan dukungan dan bantuan diperlukannya pengungkapan informasi atau bercerita dari korban kepada orang lain, baik kepada keluarga, sahabat, maupun lembaga tertentu. *Speak up* atau bersuara menjadi hal yang penting dalam proses pemulihan korban. Namun, tak semua korban berani untuk bicara, bahkan beberapa korban membutuhkan waktu lama untuk menghapus traumanya. Tidak semua korban sanggup untuk mengingat kembali kejadian tersebut (Mel, 2021, Juni 10).

Ditambah munculnya stigma atau label negatif dari masyarakat sekitar yang membuat korban semakin enggan untuk berbicara. Informasi sebagai korban kekerasan seksual adalah sesuatu yang bersifat privasi. Tidak mudah bagi korban untuk mengungkapkan diri dan bercerita mengenai apa yang dialaminya, dibutuhkan kekuatan dan kepercayaan kepada orang lain.

Hubner & Hedbom (dalam Saidah & Irwansyah, 2019, h.217) menjelaskan bahwa privasi adalah hak seseorang dalam menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi mengenai mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Beate Rosessier (dalam Saidah & Irwansyah., 2019, h.217) mendefinisikan bahwa privasi merupakan hal terkontrol akses ke informasi pribadi. Sandra Petronio (dalam West & Turner, 2017, h. 211) mendefinisikan informasi pribadi (*private information*) sebagai informasi mengenai hal-hal yang sangat penting bagi orang. Pada penelitian ini, informasi pribadi merujuk pada informasi mengenai korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, individu memiliki hak untuk menentukan kapan, bagaimana, dan mengontrol sejauh mana informasi bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual yang diberikan kepada orang lain.

Adanya informasi pribadi tersebut, maka dibutuhkan upaya dalam mengelola informasi tersebut. Dikarenakan adanya stigma dan sanksi sosial masyarakat, maka aturan-aturan dalam mengelola informasi diperlukan, seperti menentukan informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, memilih orang kepercayaan (*co-owners*) yang tepat, harapannya agar tidak semakin memberikan dampak buruk terhadap korban, terlebih pada kesehatan mental korban. Petronio dalam (West & Turner, 2020, h.166) menjelaskan bahwa individu memiliki hak

dalam mengontrol informasi pribadi. Maka dari itu, manajemen privasi komunikasi menjadi penting untuk dilihat dari perspektif korban kekerasan seksual, melihat bagaimana ketegangan pada sikap terbuka terhadap orang lain, namun tetap menjaga privasi melalui aturan-aturan informasi yang dibuat.

Penelitian ini akan melihat upaya individu dalam mengelola informasi pribadi sebagai korban kekerasan seksual yang dilihat melalui teori Manajemen Privasi Komunikasi (*Communication Privacy management*) milik Sandra Petronio. Teori Manajemen Privasi Komunikasi melihat bagaimana seseorang menangani informasi pribadi mereka. (Griffin dkk., 2022, h. 153). Tujuan dari teori CPM dan penelitian yang menggunakan teori ini untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana pilihan yang dibuat dan bagaimana membuatnya menjadi lebih bermanfaat dalam semua jenis hubungan interpersonal (Petronio, 2015, h. 1). Teori ini menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan seseorang dalam mengelola hubungan antara menyembunyikan dan mengungkapkan informasi pribadi (West & Turner, 2020, h. 165). Peneliti akan melihat bagaimana seseorang menangani, mengontrol, hingga batasan-batasan seperti apa yang dibuat oleh individu dalam mengungkapkan atau menyembunyikan informasi pribadi sebagai korban kekerasan seksual.

Penelitian ini mencoba untuk mendalami pengalaman dan melihat kondisi nyata para korban kekerasan seksual dalam menjaga dan menangani informasi pribadinya. Pada penelitian ini akan berfokus melihat manajemen privasi komunikasi pada korban perempuan kekerasan seksual berusia 18-24 tahun. Terdapat penelitian terdahulu mengenai Manajemen Privasi Komunikasi, yakni penelitian yang

dilakukan oleh Bate & Amrullah (2022) dengan judul “Pengungkapan Diri dan Manajemen Privasi Komunikasi Pasien Covid-19”. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa informan cenderung melakukan seleksi ketat mengenai kepada siapa informasi harus dibagikan, para informan menyampaikan status sebagai pasien Covid-19 kepada keluarga dan teman dekat. Namun, beberapa informan justru menganggap status sebagai pasien Covid-19 bukan informasi pribadi, pengungkapan sebagai pasien Covid-19 adalah tanggung jawab sosial dalam memutus rantai penyebaran. Selain itu, terdapat penelitian yang berjudul “Strategi Manajemen Privasi Komunikasi Pasangan Lesbi dalam Lingkungan Kerja”. Hasil dari penelitian ini adalah pasangan lesbi memilih untuk menyembunyikan orientasi seksualnya kepada rekan kerja atau orang lain, mereka memilih untuk membuka diri kepada rekan kerja yang memiliki orientasi seksual yang sama. Kemudian, kriteria gender dan risiko menjadi kriteria yang paling berpengaruh dalam proses mengungkapkan dan menyembunyikan orientasi seksual informan (Shinta, 2017).

Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto (2017) dengan judul “Manajemen Komunikasi Privasi Kaum Lesbian di Kota Samarinda”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu menutup rapat informasi pribadinya mengenai orientasi seksual sebagai perempuan lesbi kepada keluarga. Individu memilih untuk mengungkapkan informasi pribadinya kepada orang terdekat dan sahabatnya. Kriteria gender dan risiko menjadi kriteria yang paling berpengaruh dalam pengembangan aturan mengungkapkan atau menyembunyikan informasi orientasi seksual informan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

terdapat pada subjek penelitian, pada penelitian ini akan berfokus melihat manajemen privasi komunikasi yang dilakukan oleh korban kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana manajemen privasi komunikasi yang dilakukan oleh korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen privasi komunikasi yang dilakukan oleh korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang Ilmu Komunikasi, khususnya teori manajemen privasi komunikasi yang berfokus pada informasi pribadi mengenai korban kekerasan seksual. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini juga dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan teori manajemen privasi komunikasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberi pengetahuan kepada masyarakat untuk menambah wawasan dan mencegah adanya tindakan kekerasan. Kemudian, bagi korban kekerasan seksual lain penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan manajemen privasi komunikasi.

E. Kerangka Teori

1. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah interaksi verbal dan nonverbal antara dua orang atau terkadang lebih yang saling bergantung (DeVito, 2022, h.22). Komunikasi interpersonal mengacu pada komunikasi tatap muka yang melibatkan dua orang atau komunikasi diadik. Komunikasi interpersonal terdiri dari banyak subkonteks, seperti hubungan pertemanan, keluarga, pernikahan, dan lain-lain. Selain itu, komunikasi interpersonal juga melihat berbagai isu dan tema, seperti risiko, kekuasaan, emosi, ketertarikan, dan lain-lain (West, R., & Turner, L., 2020, h. 29). Dalam bukunya, DeVito (2022, h. 24) memaparkan tujuh elemen komunikasi interpersonal, yakni:

a. Sumber-Penerima

Komunikasi interpersonal setidaknya melibatkan dua orang, masing-masing individu menjalankan fungsi sumber atau yang mengirim pesan dan menjalankan fungsi penerima atau memahami dan menginterpretasikan pesan. DeVito (2022, h. 24) menekankan bahwa kedua fungsi tersebut dapat dilakukan oleh setiap individu.

b. Pesan

Pesan merupakan sinyal yang berfungsi sebagai rangsangan bagi penerima dan diterima oleh salah satu indera. Pesan dapat berupa verbal dan nonverbal, seperti kata-kata, kalimat, gerak tubuh, sentuhan. Pesan juga dapat dikirim dan diterima pada saat yang sama atau yang disebut dengan komunikasi sinkron. Selain itu, pesan juga dapat dikirim pada

satu waktu, namun diterima dan ditanggapi pada waktu yang berbeda atau komunikasi asinkron (DeVito, 2022, h. 26).

c. Saluran (*Channel*)

Saluran komunikasi adalah media yang dilalui pesan. Komunikasi tidak hanya terjadi melalui satu media, terkadang dua, tiga, atau lebih sekaligus. Misal dalam interaksi tatap muka, menggunakan media vokal dan auditorial, sekaligus memberi isyarat atau sentuhan. Kemudian, ketika berkomunikasi secara *online*, kerap kali mengirim foto, audio, atau video dalam pesan yang sama (DeVito, 2022, h. 27).

d. Gangguan (*Noise*)

Gangguan adalah segala sesuatu yang mendistorsi pesan dan menghalangi penerima untuk menerima pesan sebagaimana pengirim kirimkan. Gangguan terdapat 3 jenis, yakni: 1) Gangguan fisik, seperti tulisan sulit dibaca, tata bahasa buruk, iklan *pop-up*. 2) Gangguan fisiologi, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, memori, masalah artikulasi. 3) Gangguan psikologis, seperti gangguan mental. 4) Gangguan semantik, seperti adanya sistem makna yang berbeda (perbedaan bahasa, dialek, istilah) (DeVito, 2022, h. 28).

e. Konteks

Komunikasi selalu terjadi dalam konteks yang memengaruhi bentuk dan isi pesan. Cara berkomunikasi pada saat berada di rumah duka tentunya berbeda ketika sedang berada di acara konser musik. Misal

dalam jejaring sosial, tentunya akan berbeda ketika berkomunikasi di LinkedIn dan di Instagram (DeVito, 2022, h. 30).

f. Efek

Komunikasi interpersonal mempunyai pengaruh terhadap orang yang terlibat dalam tindakan komunikasi. Pengaruh atau efek dapat berupa, 1) Efek kognitif, adanya perubahan dalam pemikiran. 2) Efek afektif, adanya perubahan pada sikap, nilai, kepercayaan, dan emosi. 3) Efek perilaku, adanya perubahan perilaku (DeVito, 2022, h. 30).

g. Etika

Komunikasi interpersonal melibatkan tentang baik dan buruk, benar dan salah, moral dan tidak bermoral (DeVito, 2022, h. 31).

Teori ini bertujuan untuk melihat proses komunikasi interpersonal antara korban kekerasan seksual dan pihak yang diberitahu informasi pribadi (*co-owners*). Teori komunikasi interpersonal merupakan konteks komunikasi dari teori manajemen privasi komunikasi, di mana dilihat ketika korban kekerasan seksual dan *co-owners* bernegosiasi, koordinasi, dan membuat kesepakatan terkait aturan informasi pribadi yang telah menjadi milik bersama.

2. *Communication Privacy Management Theory* (Teori Manajemen

Privasi Komunikasi)

Teori *Communication Privacy Management* (CPM) merupakan teori yang dikembangkan oleh Sandra Petronio, seorang profesor komunikasi di Indiana University-Purdue University Indianapolis. Teori Komunikasi Manajemen Privasi Komunikasi memiliki pendekatan komprehensif dan menjelaskan salah

satu proses sosial yang paling penting, namun cukup menantang yakni mengelola, mengungkapkan, dan melindungi informasi pribadi (Petronio, S & Child, J., 2020, h. 76). Petronio melihat teori Manajemen Privasi Komunikasi sebagai deskripsi mengenai seseorang menangani informasi pribadi yang mereka miliki (Griffin, E., 2022, h. 152). Di era saat ini, banyak diskusi mengenai bagaimana individu berpikir tentang privasi dalam hubungan interpersonal, keluarga, bisnis, dan interaksi interpersonal di media sosial.

Tujuan dari teori CPM dan penelitian yang menggunakan teori ini untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana pilihan yang dibuat dan bagaimana membuatnya menjadi lebih bermanfaat dalam semua jenis hubungan interpersonal (Petronio, 2015, h. 1). Teori ini menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan seseorang dalam mengelola hubungan antara menyembunyikan dan mengungkapkan informasi pribadi (West & Turner, 2020, h. 165). Petronio menjelaskan bahwa fokus dari teori ini adalah pada pengungkapan informasi pribadi. Pengungkapan juga terkait dengan konsep privasi. Petronio berpendapat bahwa privasi dipahami dalam ketegangan dialektis dengan pengungkapan. Jika individu mengungkapkan semuanya, tidak akan memiliki konsep privasi. Namun, jika semua informasi dirahasiakan, gagasan pengungkapan tidak masuk akal (West & Turner, 2020, h. 166).

Pada teori ini, Petronio menggunakan istilah *disclosure of private information*, alih-alih *self-disclosure*, seperti yang dilakukan oleh banyak ahli teori relasional. Hal ini dikarenakan, terdapat informasi pribadi yang kita ceritakan bukan tentang diri kita, melainkan tentang orang lain. Kedua, Petronio

menghindari istilah *self-disclosure*, karena biasanya dikaitkan dengan keintiman atarpribadi. Petronio menjelaskan bahwa *disclosure of private information*, tidak hanya berfokus pada tindakan sepihak, namun juga mengarah pada bagaimana orang yang dipercaya (*co-owners*) menangani informasi yang telah menjadi tidak terlalu pribadi tersebut (Griffin, 2022, h. 152). Dengan demikian, CPM sepenuhnya adalah teori komunikasi, di mana dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya mencari pemahaman mengenai fenomena komunikasi sebagai sebuah teori komunikasi interpersonal (Braithwaite & Schrodt, 2022, h.319).

Selain itu, teori CPM meneliti bagaimana individu mengungkapkan melalui sistem berbasis aturan. CPM berfokus pada struktur aturan yang dibuat untuk pengungkapan dan menahan diri (West & Turner, 2017, h. 211). Teori Manajemen Privasi Komunikasi mengajukan lima prinsip yang saling terkait untuk melihat proses individu dalam melakukan pengungkapan informasi pribadi (West & Turner, 2017, h. 211).

1. Kepemilikan Informasi Pribadi

Pada prinsip ini menyatakan setiap orang percaya bahwa mereka memiliki informasi mengenai diri mereka sendiri dan dapat mengelolanya sebagaimana yang mereka inginkan. Petronio mendefinisikan informasi pribadi (*private information*) sebagai informasi mengenai hal-hal yang sangat penting bagi orang. Proses mengomunikasikan informasi pribadi kepada orang lain disebut sebagai pengungkapan pribadi (*private disclosure*). Prinsip ini melihat bahwa individu percaya bahwa mereka

punya hak dan meyakini memiliki informasi pribadi (Griffin dkk, 2022, h. 153).

2. Pengendalian Informasi Pribadi

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang dapat mengendalikan informasi pribadi mereka. Petronio menjelaskan bahwa tingkat pengendalian dapat berkisar, rendah, sedang, hingga tinggi. Jika informasi pribadi hanya sedikit orang yang diperbolehkan untuk mengetahui, maka tingkat pengendalian menjadi tinggi. Sedangkan, jika informasi pribadi hanya diperbolehkan beberapa orang mengetahuinya, maka tingkat pengendalian sedang. Jika banyak orang diperbolehkan untuk mengetahuinya, maka tingkat pengendalian menjadi rendah.

Prinsip ini memperkenalkan konsep batas-batas pribadi (*private boundaries*). Adanya batas-batas privat yang dibangun untuk memperjelas bahwa ada batas antara pribadi dan publik. Di satu sisi batas, individu menyimpan informasi pribadi untuk diri mereka sendiri dan di sisi lain, individu mengungkapkan beberapa informasi pribadi kepada orang lain. Batas-batas di sekitar informasi pribadi berada di dalam kendali individu untuk diatur dan diubah (West & Turner, 2017, h. 212).

3. Aturan Informasi Pribadi

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu membuat keputusan mengenai cara mengontrol informasi pribadi mereka sendiri berdasarkan pada aturan. Aturan privasi memiliki dua fitur utama, yakni pengembangan

dan atribut. Pengembangan aturan (*rule development*) dipandu oleh kriteria keputusan individu dalam mengungkapkan atau menyembunyikan informasi pribadi. Teori CPM menyatakan terdapat lima kriteria keputusan dalam mengembangkan aturan informasi pribadi, yakni: 1. Kriteria budaya, aturan privasi dapat dipengaruhi oleh pemahaman dari budaya yang dimiliki oleh individu. 2. Kriteria gender, Petronio mengungkapkan bahwa ada kemungkinan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menetapkan batas privasi mereka. Namun, baik laki-laki maupun perempuan kecenderungan lebih mudah mengungkapkan informasi pribadi kepada perempuan dibandingkan laki-laki (Griffin, dkk, 2022, h. 155). Kemudian Petronio (dalam Sastrianingsih, 2019) juga mendukung bahwa kesamaan gender juga menjadi salah satu kriteria dalam penyusunan aturan ketika akan melakukan pengungkapan. Adanya kecenderungan individu melakukan pengungkapan kepada individu lain yang memiliki gender yang sama dengan pengungkap.

3. Kriteria motivasi, individu membuat keputusan terkait mengungkapkan informasi pribadi berdasarkan motivasi mereka. Beberapa orang memiliki motif seperti pengendalian, manipulasi, kekuasaan dalam mengungkapkan atau menyembunyikan informasi pribadi. Selain itu, juga dapat dipengaruhi oleh klarifikasi diri atau kedekatan relasional. 4. Kriteria kontekstual, memiliki pengaruh terhadap keputusan pengungkapan atau penyembunyian informasi pribadi seseorang. Petronio dalam (Nugrahani, A., 2012) kontekstual terdiri dari dua elemen, yakni lingkungan sosial dan

lingkungan fisik. Lingkungan sosial adalah adanya keadaan khusus yang mungkin mendorong terjadinya pengungkapan atau penyembunyian informasi. Sedangkan, lingkungan fisik berkaitan dengan lokasi. 5. Kriteria manfaat-risiko, aturan privasi dipengaruhi oleh penilaian atas rasio manfaat-risiko dalam mengungkapkan informasi pribadi (West & Turner, 2017, h. 214).

Beberapa manfaat di antaranya, rilis dari stres, mendapatkan dukungan sosial, mendekati diri dengan orang yang kita beritahu, hingga kesempatan untuk memengaruhi orang lain. Sedangkan risiko, seperti rasa malu, penolakan, berkurangnya kekuatan, dan semua orang menjadi tahu rahasia kita (Griffin, dkk, 2022, h. 155). Kemudian, atribut aturan privasi (*privacy rule attributes*), mengacu pada cara orang memperoleh aturan dan sifat-sifat aturan. Aturan privasi dapat dipengaruhi oleh proses sosialisasi dengan orang lain (West & Turner, 2017, h. 215).

4. Kepemilikan Bersama dan Penjagaan Informasi Pribadi

Prinsip ini mengacu pada informasi dibagikan dan dimiliki bersama. Ketika informasi pribadi diberitahu kepada orang lain, maka itu telah menjadi batas kolektif (*collective boundary*). Ketika informasi pribadi tidak diungkapkan, maka batas ini disebut sebagai batas pribadi (*personal boundary*) (West & Turner, 2017, h. 215). Ketika orang lain diberitahu atau menemukan informasi pribadi seseorang, maka mereka telah menjadi pemilik bersama (*co-owners*) dari informasi tersebut. Tindakan

mengungkapkan informasi pribadi akan menciptakan *co-owners* dan menarik orang tersebut ke batas privasi kolektif (Griffin, 2022, h. 156).

Pengungkap harus menyadari bahwa batas privasi yang mencakup informasi pribadi, telah berubah menjadi batas kolektif. Maka dari itu, setiap individu yang memiliki informasi pribadi harus mempertimbangkan secara hati-hati sebelum membagikannya kepada orang lain. Petronio juga mengungkapkan bahwa pemilik informasi bersama (*co-owners*) cenderung merasa bertanggung jawab atas informasi yang diterimanya tersebut, namun bukan berarti mereka menganggap memiliki tanggung jawab yang sama (Griffin, 2022, h. 156).

Elemen penting dalam prinsip ini adalah koordinasi batas (*boundary coordination*), mengacu pada bagaimana pemilik informasi bersama (*co-owners*) mengelola informasi yang dimiliki bersama. Kepemilikan bersama ini diatur melalui pertalian batas (*boundary linkage*), kepemilikan batas (*boundary ownership*), dan permeabilitas batas (*boundary permeability*). Pertalian batas berkaitan dengan koneksi yang membentuk aliansi batas antara orang atau ketika individu memberitahukan informasi pribadi ke orang lain, maka keduanya telah membentuk *boundary linkage* atau terkait dalam batas privasi. Kemudian, kepemilikan batas mengacu pada hak dan keistimewaan yang diperoleh bersama pemilik informasi pribadi. Agar kepemilikan batas dapat dilakukan secara akurat, maka aturan harus jelas. Dalam hal ini adanya koordinasi terkait kepada siapa saja informasi dapat dibagikan kepada pihak ketiga. Koordinasi batas dapat dicapai melalui

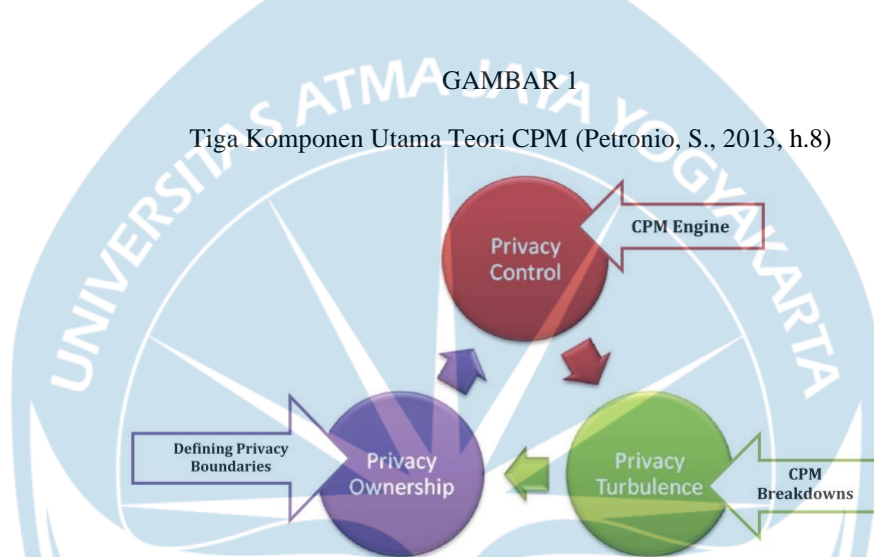
permeabilitas batas, yang mengacu pada seberapa banyak informasi yang dapat melewati batas. Ketika akses ke informasi pribadi tertutup, maka batas-batas menjadi tebal (*thick boundaries*). Batas tebal didefinisikan ketika adanya sedikit atau tidak adanya informasi untuk dilewati. Ketika akses terbuka ke informasi pribadi, batas menjadi tipis (*thin boundaries*). Batas tipis diartikan memungkinkan semua informasi lewat atau dapat diketahui oleh orang lain.

5. Turbulensi Batas Informasi Pribadi

Prinsip kelima mengacu pada apa yang terjadi ketika aturan privasi dilanggar. Turbulensi batas (*boundary turbulence*) muncul ketika aturan koordinasi batas tidak jelas (West & Turner, 2017, h. 217). Beberapa faktor yang dapat menyebabkan turbulensi batas, pertama, *fuzzy boundaries* (batas kabur), terjadi ketika tidak ada batas yang diakui bersama, orang kepercayaan cenderung menggunakan aturan privasi mereka sendiri untuk memandu apa yang mereka katakan atau bagikan kepada orang lain (Griffin, 2022, h. 160).

Kedua, *intentional breaches* (pelanggaran yang disengaja), seseorang melakukannya demi keuntungan pribadi atau melukai pemilik informasi. Terkadang, dilema kerahasiaan terjadi ketika orang kepercayaan melanggar batas privasi kolektif tersebut dalam rangka mempromosikan kesejahteraan pemilik informasi. Ketiga, *mistakes*, dapat berupa kesalahan penilaian, membuat kekacauan, dan kesalahan perhitungan (Griffin, 2022, h. 161).

Dari kelima prinsip teori CPM di atas, Petronio menyederhanakan prinsip tersebut ke dalam tiga komponen utama, yakni kepemilikan privasi, kontrol privasi, dan turbulensi privasi. Ketiga elemen ini membantu dalam memahami perilaku, keputusan, dan perubahan dalam mengelola informasi pribadi (Petronio, 2013, h. 8).



Di samping itu, West & Turner (2020, h.166) menjelaskan teori CPM didasarkan pada tiga asumsi mengenai sifat manusia yang selaras dengan aturan dan sistem, yakni:

1. Manusia adalah pembuat pilihan

Teori ini membantu individu untuk lebih memahami pilihan atau keputusan yang mereka buat serta bagaimana keputusan tersebut membantu dalam menjalin relasi mereka dengan orang lain. Individu memiliki hak dalam mengontrol informasi pribadi dan ketika ia memutuskan untuk mengungkapkan, maka informasi tersebut menjadi milik bersama.

2. Manusia adalah individu yang dapat membuat aturan dan mengikuti aturan

Dengan adanya aturan tersebut, ini dapat menjadi pegangan dan memberi tahu kita terkait informasi apa yang akan diungkap dan tidak.

3. Pilihan dan aturan didasarkan pada pertimbangan diri sendiri dan orang lain

CPM berfokus pada ketegangan pada sikap terbuka terhadap orang lain, namun tetap menjaga privasi mereka. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa kebutuhan kita akan diri sendiri dan bersosialisasi memengaruhi keputusan privasi. Ketiga asumsi ini mewakili persepsi manusia yang aktif dan terlibat dalam kehidupan relasional diri mereka dan orang lain.

Dalam penelitian ini, teori manajemen privasi komunikasi akan membantu untuk melihat bagaimana proses mengungkapkan atau menyembunyikan informasi pribadi mengenai korban kekerasan seksual melalui lima prinsip manajemen privasi komunikasi yang saling terkait, yakni 1) Kepemilikan informasi pribadi 2) Pengendalian informasi pribadi 3) Aturan informasi pribadi 4) Kepemilikan bersama dan penjagaan informasi pribadi 5) Turbulensi batas informasi pribadi.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna terhadap

apa yang terjadi pada sejumlah individu maupun kelompok yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016, h. 4). Henink, dkk (dalam Haryono, 2020, h. 36) memaparkan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mengizinkan peneliti untuk mengamati dan menggali pengalaman individu atau kelompok secara mendetail. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menerapkan cara pandang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2016, h. 5).

Pada praktiknya, penelitian kualitatif meneliti manusia dalam tata cara natural keseharian, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pengalaman dan perilaku mereka. Sedangkan, Moleong (dalam Hidayat & Setyanto, 2019, h.488) memaparkan penelitian kualitatif berusaha untuk memahami mengenai perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang dimiliki oleh informan dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara ilmiah. Penelitian kualitatif menjadi cocok dalam penelitian ini, dikarenakan peneliti akan mengamati, menggali, dan memberikan penjelasan terkait manajemen privasi komunikasi yang dilakukan oleh korban kekerasan seksual.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus merupakan dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap kejadian, proses, satu atau lebih orang dan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data secara mendetail (Sugiyono, 2022, h. 6).

Kemudian, hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif. Hasil data deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek tertentu. Penelitian ini menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antarvariabel (Kriyantono, 2006, h. 67).

3. Subjek Penelitian

Subjek atau informan penelitian adalah orang yang diyakini memiliki pengetahuan dan terlibat dengan permasalahan yang akan diteliti (Rukin, 2019, h.75). Pada penelitian ini, subjek penelitiannya adalah korban kekerasan seksual. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2022, h. 96)

Peneliti akan memilih informan berdasarkan kriteria berikut:

- 1) Perempuan dengan rentang usia 18-24 tahun.
- 2) Korban kekerasan seksual.

Pada penelitian ini, peneliti meneliti tiga perempuan korban kekerasan seksual. Alasan peneliti memilih perempuan dan rentang usia 18-24 tahun, dikarenakan sepanjang tahun 2022 korban perempuan kekerasan seksual mencapai 23.684 orang dibandingkan korban laki-laki sebanyak 4.394 orang (Santika, 2023, Feb 3). Selain itu, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan,

masih adanya stigma yang melekat di masyarakat bahwa perempuan adalah kelas dua, lemah, tak berdaya (Fitriana, 2022, Maret 22).

Peneliti memilih usia 18-24 tahun, dikarenakan berdasarkan data Komnas perempuan, korban kekerasan terbanyak ada pada usia 18-24 tahun mencapai 1.704. Jumlah ini merupakan terbanyak dibandingkan kelompok usia lainnya (Dhini, 2022, Juni 16). Peneliti mendapatkan tiga perempuan korban kekerasan seksual dengan mencari dan observasi melalui media sosial Twitter melalui *#korbankekerasanseksual*, *#kasuskekerasanseksual*, dan kata kunci lain yang berkaitan. Setelah melakukan observasi dan menemukan korban kekerasan seksual, peneliti mengirim pesan melalui *direct message* untuk menanyakan apakah korban bersedia atau tidak untuk menjadi subjek penelitian.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan topik permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti dalam riset sosial (Mukhtazar, 2020, h.45). Objek pada penelitian ini adalah manajemen privasi komunikasi yang dilakukan oleh korban kekerasan seksual.

5. Sumber Data

- a. Data Primer, merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti data atau data didapatkan dari subjek penelitian (Sugiyono, 2022, h.104). Pada penelitian ini, data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan informan.

- b. Data Sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau diperoleh dari sumber kedua (Sugiyono, 2022, h.104). Data sekunder dapat diperoleh melalui penelitian terdahulu, buku, dan internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data untuk mengungkapkan makna terkait masalah yang diteliti (Rukajat, 2018, h. 24). Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*, yakni pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Wawancara semiterstruktur meminta pendapat dan ide dari informan penelitian (Sugiyono, 2022, h.115). Pada wawancara semiterstruktur, pewawancara mempunyai daftar pertanyaan tertulis, tetapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan secara bebas, namun tetap berada pada jalur pokok permasalahan yang akan ditanyakan terlebih dahulu (Kriyantono, 2006, h. 99). Sesuai dengan judul penelitian, maka peneliti akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan manajemen privasi komunikasi.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2022, h. 131). Fossey (dalam Yusuf, 2014, h.400) menjelaskan analisis data kualitatif merupakan proses *mereview* dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data sehingga dapat menggambarkan fenomena sosial yang diteliti.

Terdapat tiga aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2022, h. 133):

a. Reduksi data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih dan fokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi, peneliti dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Miles & Huberman (dalam Yusuf, 2014, h. 407) menjelaskan reduksi data sebagai suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan serta diverifikasikan. Peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dengan informan. Dari data tersebut, peneliti akan mereduksi, menyeleksi, dan memilih data yang sesuai untuk menjawab masalah penelitian. Peneliti memilah berdasarkan lima prinsip dari teori manajemen privasi komunikasi (CPM).

b. *Data display* (penyajian data)

Miles & Huberman (dalam Yusuf, 2014, h. 408) memaparkan *data display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun dan memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2022, h. 137) menjelaskan dengan *data display*, akan memudahkan seseorang untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Penyajian data yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti akan menyajikan data dengan menggunakan teks naratif agar dapat melihat dan memahami informasi secara menyeluruh.

c. Kesimpulan/verifikasi

Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2022, h. 142) menjelaskan kesimpulan dalam penelitian kualitatif berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Miles & Huberman (dalam Yusuf, A., 2014, h. 409) kesimpulan menuntut verifikasi, baik melalui seorang ahli di dalam bidang diteliti atau mengecek dengan data lain.

8. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, serta berbagai waktu (Sugiyono, 2022, h. 189). Dalam penelitian ini, pengujian kredibilitas menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2022, h.191). Triangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan wawancara bersama komisioner purnabakti Komnas Perempuan dan melihat data dan hasil penelitian terdahulu. Peneliti juga akan melakukan *member checking*. *Member checking* dilakukan untuk mengetahui akurasi hasil penelitian dengan cara membawa kembali laporan akhir kepada informan (Creswell, 2016, h. 269). Hal ini bertujuan agar informasi yang diperoleh dalam penelitian sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh informan (Sugiyono, 2022, h. 193).

